

HARUM SEMERBAK ALAM

EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KPH YOGYAKARTA



Bunga Celosia yang banyak ditanam di beberapa area Wisata Hutan Pinus Mangunan



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

HARUM SEMERBAK ALAM: EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KPH YOGYAKARTA

Purwoharsono
Ferierrren Currasavica
Haviz Kurniawan

Foto Sampul : Tim Penyusun
Foto Isi Booklet : Staf KPH Yogyakarta

Booklet Ini Merupakan Seri Ketiga (dari Enam Seri) Hasil Penelitian
"Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola
dalam Mencapai Pengelolaan Hutan Lestari:
Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta" Kerjasama antara
Center for International Forestry Research
dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Balai KPH Yogyakarta
di Bawah Proyek Penelitian Kanoppi 2:
Membangun dan Mempromosikan Wana Tani Berbasis Pasar dan Integrasi
Pengelolaan Lanskap untuk Petani Hutan di Indonesia
2019



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Kata Pengantar

CIFOR (*Center for International Forestry Research*) melalui kegiatan penelitian aksi partisipatif Kanoppi, sangat bangga dengan diterbitkannya seri booklet yang didukung dana ACIAR (*Australian Center for International Agricultural Research*). Booklet ini disusun sebagai bagian dari studi “Peningkatan efektifitas model tata kelola dalam upaya mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan: Studi kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta.” Studi ini merupakan salah satu kegiatan penelitian dalam rangka memformulasikan rekomendasi untuk penyusunan kelembagaan yang tangguh di tingkat tapak. CIFOR berterima kasih kepada para mitra yang sudah terlibat dalam penelitian ini, terutama Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I. Yogyakarta, dan KPH Yogyakarta.

Koordinator Penelitian Kebijakan Kanoppi
Ani Adiwinata Nawir, Ph.D

Pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia belum menggemblakan, dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Kebijakan pembentukan KPH ditujukan untuk merespon kebutuhan akan pengelola hutan di tingkat tapak yang profesional dan mandiri yang dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Balai KPH Yogyakarta memiliki sejarah panjang dan saat ini dipandang sebagai salah satu rujukan utama bagi KPH-KPH lain di Indonesia. Walaupun demikian, kami secara kontinyu mengembangkan berbagai inovasi, termasuk dengan bersinergi dengan berbagai mitra. Melalui kerjasama dengan *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan Fakultas Kehutanan UGM ini, kami berharap pengelolaan hutan oleh Balai KPH Yogyakarta semakin profesional. Dengan seri booklet ini, kami berharap diseminasi model-model kelola, pengalaman dan tantangan di Balai KPH Yogyakarta, dapat menjadi pembelajaran bagi KPH lain di Indonesia.

Kepala Balai KPH Yogyakarta
Ir. Aji Sukmono Nurjaman, M.P



Sejalan dengan visi universitas sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul, inovatif, dan mengabdikan kepada kepentingan bangsa, Fakultas Kehutanan UGM secara kontinyu berupaya menjadi elemen penting untuk mewujudkan pembangunan kehutanan nasional berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Fakultas Kehutanan UGM terus menjalin kerjasama dan sinergi dengan berbagai mitra baik nasional maupun internasional. Center for International Forestry Research (CIFOR) merupakan salah satu mitra penting kami. Melalui kerjasama penelitian “Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola dalam Mencapai Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”, kami bersinergi memfasilitasi agar kebijakan nasional terkait KPH dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan pengelolaan hutan. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM
Dr. Budiadi, S.Hut, M.Agr.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Ekowisata: Peluang Bisnis Baru KPH Yogyakarta	2
Strategi Pengembangan Ekowisata	4
Penutup	12
Pustaka	13

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tren pengembangan wisata berbasis alam (ekowisata). Banyak negara saat ini menempatkan ekowisata sebagai industri utama. Sebagai contoh, 50% dari total wisatawan yang mengunjungi Nepal pernah mengunjungi paling tidak satu taman nasional di negara tersebut (FAO, 2005). Hal ini dipicu oleh peningkatan minat wisatawan untuk merasakan pengalaman untuk menyaksikan keindahan alam dan kekayaan hayati langka baik flora maupun fauna. Pangsa pasar ekowisata sangat menjanjikan. Sebagai contoh, Yu *et al.* (1997) mencatat penjualan paket ekowisata internasional di Amerika Serikat mencapai 1,4 juta dolar pada tahun 1993, dan memperkirakan nilai tersebut akan terus tumbuh 8-10% tiap tahun. FAO (2005) juga menyatakan bahwa 40-60% wisatawan internasional merupakan “wisatawanalam”.

Sebagai sebuah konsep yang relatif baru, ekowisata masih sering disalahpahami dan justru disalahgunakan untuk menarik kesadaran konservasi wisatawan yang pada kenyataannya merupakan program wisata alam yang dapat menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif (Drumm dan Moore, 2002). World Conservation Union (IUCN) mendeskripsikan ekowisata sebagai: *“Perjalanan dan kunjungan ke kawasan alam untuk menikmati dan mengapresiasi alam yang dilakukan secara bertanggung-jawab, dengan tujuan utama mendorong konservasi dan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal”* (IUCN, 1996). Definisi ini sering dijadikan rujukan oleh berbagai institusi yang aktif berkecimpung di bidang ekowisata (Drumm dan Moore, 2002). Daya tarik ekowisata adalah prospek memadukan tujuan konservasi dan penghidupan lokal secara berkelanjutan (Kiss, 2004).

Ekowisata perlu direncanakan secara matang dan diimplementasikan secara hati-hati agar tercapai tujuan pelestarian alam sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Drumm dan Moore (2002) menyatakan bahwa banyak pegiat lingkungan yang meyakini peran krusial masyarakat sebagai *stakeholder* utama yang secara aktif dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata, yang kemudian memunculkan istilah ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*). Secara umum, ekowisata berbasis masyarakat ini ditujukan untuk mendorong kearifan lokal dalam konservasi alam sekaligus untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dan meminimalkan dampak sosial yang mungkin terjadi (Diamantis, 1999).

Ekowisata: Peluang Bisnis Baru KPH Yogyakarta

“KPH didorong untuk menjadi unit bisnis yang mandiri. Walaupun kita telah memiliki beberapa bisnis unggulan, kita akan terus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan unit-unit bisnis baru. Saat ini kita aktif menggali potensi dan mengembangkan ragam ekowisata di KPH Yogyakarta karena kita melihat “pasar” ekowisata yang sangat bergairah. Kesadaran masyarakat akan pelestarian alam mulai meningkat dan kita melihat ‘kerinduan’ mereka -khususnya masyarakat urban- dengan kenikmatan menyaksikan dan menghargai alam”

Kepala Balai KPH Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata yang paling diminati dan telah menjadi salah satu model cerita sukses pengembangan bisnis kepariwisataan di Indonesia. Kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan. Dinas Pariwisata DIY menyebutkan bahwa pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 5 juta (Statistik Kepariwisataan DIY, 2017). Tidak hanya menawarkan wisata budaya, sejarah, dan kuliner, dalam beberapa tahun terakhir wisata alam (ekowisata) menjadi salah satu ikon utama yang menarik minat kunjungan wisatawan domestik dan asing.



Panggung Sekolah Hutan, Hutan Pinus Mangunan



KPH Yogyakarta dengan area kelola seluas 15.581 ha (mencakup hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung) dengan ragam lanskap alam, mulai menggiatkan identifikasi, perencanaan, dan pengembangan kawasan ekowisata baru setelah kesuksesan ekowisata Hutan Pinus Mangunan menjadi destinasi ekowisata yang sangat populer. Tahun 2017, pengunjung ekowisata Hutan Pinus Mangunan tercatat lebih dari dua juta wisatawan, baik domestik maupun internasional. Pada tahun yang sama, ekowisata yang dikembangkan di kompleks wisata Mangunan oleh KPH Yogyakarta telah memberikan kontribusi pendapatan kurang lebih 2,3 milyar rupiah (KPH Yogyakarta, 2018). Pengembangan destinasi ekowisata baru ditujukan untuk meningkatkan pemasukan bagi KPH sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian setempat (Box 1).

Box 1.

Daftar Potensi ekowisata di KPH Yogyakarta

1. Hutan Pinus Mangunan - Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulonprogo-Bantul
 2. Kalibiru - Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulonprogo-Bantul
 3. Goa Ngingrong - Bagian Daerah Hutan (BDH) Paliyan
 4. Klayar - Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo
 5. Watupayung - Bagian Daerah Hutan (BDH) Panggang
 6. Nangka - Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo
 7. Goa Semanu - Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo
 8. Mata Air Bengkung - Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulonprogo-Bantul
 9. Goa di Resort Pengeloaan Hutan (RPH) Gebang - Bagian Daerah Hutan (BDH) Panggang
 10. Goa Luweng - Bagian Daerah Hutan (BDH) Paliyan
 11. Gunung Bagus - Bagian Daerah Hutan (BDH) Paliyan
- (Sumber: Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPH Yogyakarta, 2013).

Strategi Pengembangan Ekowisata

Salah satu faktor yang mendorong pengembangan ekowisata adalah bahwa bisnis pariwisata setempat tidak mengancam kelestarian sumber daya alam, namun justru mendukung upaya perlindungan. Ekowisata dipandang sebagai sebuah pilihan strategis yang optimal untuk melestarikan sumber daya alam dan menghasilkan pendapatan finansial yang salah satunya juga diinvestasikan kembali ke alam. Pengembangan ekowisata di KPH Yogyakarta telah dituangkan dalam strategi besar (*Grand Design*) Wana Wisata Mataram.

Wana Wisata Mataram merupakan konsep wisata yang digagas dan dikembangkan oleh KPH Yogyakarta dengan memadukan konsep lingkungan, budaya, seni, dan sejarah Jawa Mataram, yang mencakup 10 operator kawasan ekowisata berbasis masyarakat, yaitu: Pinus Pengger, Puncak Becici dengan sub Operator Literasi, Bukit Lintang Sewu dengan sub Operator Pintu Langit Dahromo, dan Pinus Asri, Pinus Sari, Seribu Batu Bukit Panguk serta Bukit Mojo.

Penyiapan payung hukum dan perangkat kebijakan

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat memerlukan payung hukum dan perangkat kebijakan, terutama yang mengatur model kemitraan, dan jenis dan tingkat pemanfaatan kawasan hutan lindung. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 merupakan rujukan bagi pengembangan kegiatan usaha ekowisata pada hutan lindung. Namun regulasi tersebut masih memerlukan beberapa turunan agar dapat dioperasionalkan di lapangan. Proses konsultasi dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kepala Dinas dan Gubernur) dan Kementerian terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata) berakhir baik dengan dikeluarkannya beberapa regulasi di tingkat provinsi yang menjadi landasan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (Box 2). Bahkan inisiatif dari daerah tersebut menjadi salah satu rujukan bagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 49/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH.

Box 2.**Penyiapan kerangka regulasi kerjasama untuk ekowisata berbasis masyarakat Hutan Pinus Mangunan**

Hutan pinus di RPH Mangunan merupakan hutan lindung dengan hasil utama getah pinus. Menurunnya produksi getah pinus yang berimplikasi pada menurunnya pendapatan (baik KPH maupun tenaga penyadap), mendorong KPH dan beberapa masyarakat setempat untuk memanfaatkan Hutan Pinus Mangunan sebagai kawasan wisata yang dimulai sejak tahun 2012. Masyarakat setempat mulai secara swadaya menyediakan fasilitas tempat parkir. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung, fasilitas yang disediakan oleh masyarakat sudah tidak memadai lagi.

Balai KPH Yogyakarta kemudian menyampaikan usulan pengelolaan kepariwisataan oleh masyarakat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah meninjau lokasi, Gubernur mengusulkan ide pengelola ekowisata Hutan Pinus Mangunan kepada Kementerian Kehutanan, yang kemudian kembali menyerahkan kewenangan teknis pelaksanaan pemanfaatan hutan kepada pemerintah daerah merujuk pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengembangan ekowisata Hutan Pinus Mangunan kemudian difasilitasi dengan keluarnya Pemerintah DIY melalui Peraturan Gubernur No. 84/2016 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung yang mengatur teknis kerjasama dengan KPH. Hasil dari pengembangan ekowisata ini hasilnya akan masuk sebagai pendapatan lain-lain untuk daerah DIY.

Pelibatan masyarakat lokal

Secara tradisional, masyarakat lokal merupakan penjaga berbagai kawasan perlindungan dan konservasi. Mereka dapat berperan penting dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya sehingga mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam pengembangan ekowisata, mulai dari perencanaan, implementasi dan proses-proses pengambilan kebijakan/keputusan. Masyarakat yang melingkupi sebuah ekowisata tidak homogen. Mereka mempunyai latar belakang, pandangan, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap kawasan ekowisata.

Box 3.**Koperasi Notowono**

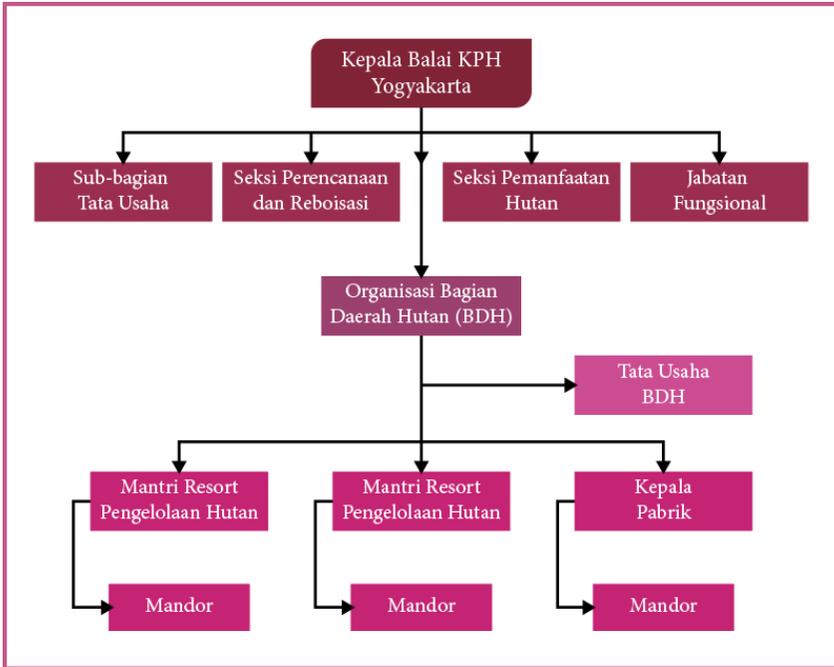
Koperasi “Notowono”, sering disingkat “Nowo”, yang bermakna sembilan yang merupakan angka tertinggi. “Nowo” mengandung arti bahwa koperasi Notowono dan seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pemanfaatan hutan lindung sebagai ekowisata dengan tetap menjaga keseimbangan tiga pilar: ekologi, ekonomi, dan sosial. Koperasi ini mempunyai visi untuk “merawat, menjaga, dan melestarikan hutan untuk dikembangkan jasa lingkungan wisata alam dalam rangka mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya”. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi:

- 1. Bersama dengan instansi terkait menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap hutan agar dapat diambil manfaatnya untuk mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar*
- 2. Bersama dengan instansi terkait menghijaukan lahan-lahan yang kosong dengan menanam berbagai jenis tanaman*
- 3. Bersama dengan instansi terkait menata hutan agar lebih indah, nyaman, sejuk, dan asri demi kepentingan pengembangan jasa lingkungan wisata alam*
- 4. Bersama dengan instansi terkait merawat, menjaga, dan melestarikan hutan dari kerusakan baik yang terjadi karena gejala alam maupun ulah manusia.*
- 5. Untuk membangun kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maka kelompok membentuk wadah badan hukum koperasi sebagai landasan jalinan kerja sama yang langgeng*

Anggota dari koperasi Notowono terdiri dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Pinus Sari, Becici Asri, Bukit Lintang Sewu, Gunung Pengger, Seribu Batu, Gunung Mojo dan Bukit Panguk yang merupakan masyarakat sekitar hutan RPH Mangunan.

Balai KPH Yogyakarta memandang peran krusial masyarakat lokal pengembangan ekowisata yang dituangkan dalam *Grand Design* Wana Wisata Mataram. 10 operator kawasan dengan 7 kawasan sebagai operator dan 3 kawasan sebagai sub operator ekowisata, yang sedang digarap saat ini dikerjasamakan dengan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Noto Wono (Box 3), yang mempunyai makna menata hutan. Konsep yang dikembangkan dalam koperasi ini adalah keselarasan hubungan antara kelestarian hutan, pengelola kawasan wisata, masyarakat sekitar hutan serta pemerintah supaya memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Para anggota koperasi merupakan penerima manfaat langsung finansial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Di sisi lain secara tidak langsung keberadaan objek wisata alam Mangunan membuka akses masyarakat sekitar hutan secara luas mendapatkan peningkatan pendapatan dan mata pencaharian. Masyarakat memegang peran kunci untuk bertanggung jawab dalam menata seluruh aktivitas pemanfaatan hutan lindung untuk mencapai fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk menunjang keberhasilan ekowisata, koperasi ini melakukan kelola kelembagaan, kelola usaha, dan kelola kawasan.

Gambar 1. Struktur Organisasi KPH Yogyakarta



KPH Yogyakarta memiliki kerangka lembaga yang sudah baik dan lengkap yang menunjang kegiatan mereka. Sumber daya manusia di KPH juga merupakan profesional di bidangnya, yaitu lulusan di bidang kehutanan sehingga memahami seluk-beluk pekerjaan mereka. Dalam bentuk kelola usaha, KPH juga telah menjalin kerjasama dan menginisiasi pembentukan koperasi bersama masyarakat lokal dalam menjamin kelangsungan bisnis yang legal dan bertanggung jawab. Balai KPH Yogyakarta dan pengurus koperasi terus aktif mendorong partisipasi anggota dan masyarakat umum lainnya untuk ikut mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Sebagai contoh, koperasi secara rutin mengagendakan penanaman kembali tanaman pinus dan jenis-jenis tanaman lain untuk meningkatkan fungsi perlindungan hutan (Widanti, 2018).

Selain itu, masyarakat juga secara rutin melakukan kegiatan observasi dan monitoring untuk meminimalkan dampak lingkungan dari ekowisata. Namun kegiatan-kegiatan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal kepedulian dan partisipasi masyarakat secara luas (Pratiwi, 2015).

Dalam bentuk kelola kawasan, KPH juga secara berkala memperbarui tata batas kawasan dan melaporkan peta kawasan ke kementerian LHK untuk menjamin legalitas kawasan. KPH juga memiliki skema-skema pengelolaan hutan berupa izin, swadaya, serta kemitraan yang memiliki SPKS yang didukung instrumen regulasi untuk memastikan kelola usaha beserta kelola kawasan yang jelas.

Integrasi budaya lokal dalam ekowisata

Selama ini, pengembangan ekowisata banyak bertumpu pada pembuatan spot-spot swafoto. Strategi ini banyak diadopsi oleh banyak pengelola wisata di daerah lain sehingga menimbulkan kejenuhan. Pengembangan ekowisata di KPH Yogyakarta juga disinergikan dengan tradisi Yogyakarta sebagai kota budaya. Di wilayah kelola KPH Yogyakarta banyak dijumpai situs-situs bersejarah Kerajaan Mataram Islam, seperti tempat bertapa Sultan Agung. Berbagai pentas budaya khas Yogyakarta secara rutin diadakan, seperti pertunjukan sendratari, wayang orang, musik keroncong, dan festival kuliner.



Sekolah Hutan, Hutan Pinus Mangunan

Selain itu, ekowisata di KPH Yogyakarta juga akan dipadukan dengan budaya unik masyarakat setempat, termasuk dengan menggali potensi cerita-cerita lokal (*folklores*), yang berkaitan dengan wilayah ekowisata tertentu. Selain itu, KPH Yogyakarta bersama dengan Koperasi Noto Wono juga berupaya memadukan unsur budaya dalam ekowisata adalah dengan mendorong pengunjung untuk ikut mempelajari budaya lokal. Pengenalan budaya setempat kepada pengunjung dan akar budaya setempat yang dijaga sehingga tetap mengakar hingga generasi selanjutnya sebagai upaya masyarakat dalam peningkatan sosial budaya.

Perpaduan antara alam dan budaya yang dikembangkan oleh Wana Wisata Mataram sudah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pada tahun 2017, Wana Wisata Mataram meraih juara II kategori surga tersembunyi terpopuler dari Kementerian Pariwisata.

Kerjasama dengan industri pariwisata lain

Drumm & Moore (2002) menyatakan bahwa ekowisata berbasis masyarakat sangat jarang berhasil tanpa kemitraan dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Akses ke pasar, kemampuan organisasi dan komunikasi yang lemah seringkali menjadi kendala bagi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekowisata di KPH Yogyakarta dipadukan dengan industri pariwisata lainnya yang disinergikan dengan strategi kebijakan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai contoh, Dinas Pariwisata DIY sejak tahun 2017 telah menetapkan Desa Mangunan dengan Wana Wisata Budaya Mataram sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi wisata bertaraf internasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelola Wana Wisata Budaya Mataram terus menggiatkan kerjasama dengan berbagai pelaku pariwisata termasuk operator tur dan agen perjalanan, restoran, industri kerajinan, pemandu wisata, dan hotel. Ekowisata yang dikembangkan oleh KPH Yogyakarta juga banyak dibantu dengan banyaknya laman-laman internet dunia pariwisata maupun berbagai media sosial seperti Facebook dan Instagram. Para pelaku industri pariwisata tersebut dapat memainkan peran penting untuk mewujudkan ekowisata berkelanjutan. Selain mampu mempromosikan ekowisata, mereka juga dapat mendorong wisatawan untuk berperilaku yang baik terhadap alam dan meminimalkan dampak lingkungan.

Mitigasi dampak lingkungan

Sering ada kekhawatiran mengenai kemungkinan gangguan dan kerusakan alam dengan dikembangkannya ekowisata, terutama yang berpotensi mendatangkan pengunjung secara masif. Banyak kajian mengenai daya dukung serta sentimen yang kurang positif dari pegiat lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat mengenai dampak negatif wisata alam yang masif. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus diiringi dengan upaya meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Untuk mitigasi dampak lingkungan, KPH Yogyakarta telah menyusun Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak koperasi dengan menetapkan maksimal 10% kawasan hutan lindung yang boleh dipergunakan untuk area ekowisata. Sebagai contoh, dari keseluruhan luasan hutan lindung di RPH Mangunan 560 hektar, hanya sekitar 29,4 hektar (5%) yang diperuntukkan sebagai kawasan ekowisata.

Pengelola ekowisata di KPH Yogyakarta, seperti ekowisata Hutan Pinus Mangunan, secara bertahap menyiapkan berbagai instrumen *monitoring*, dokumentasi, dan analisis terhadap munculnya dampak lingkungan, sebagai pertimbangan perumusan strategi perbaikannya.



Arung Jeram pada salah satu Sungai di Wilayah KPH Yogyakarta

Edukasi terhadap pengunjung telah menjadi salah satu fokus strategi mitigasi dampak lingkungan. Wisatawan alam merupakan sasaran yang cukup ideal untuk dilakukannya pembelajaran alam. Banyak di antara mereka yang ingin mengetahui jenis-jenis flora dan fauna, serta tingkah laku satwa tertentu dalam perjalanan mereka menyusuri kawasan ekowisata.

Pengembangan kerjasama penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan yang cukup krusial untuk mendorong pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat berkelanjutan di KPH Yogyakarta. Sudah banyak studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti/dosen dan mahasiswa mengenai dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari ekowisata di KPH Yogyakarta. Namun penelitian-penelitian tersebut masih bersifat sporadis dengan inisiatif mandiri dari para peneliti. KPH Yogyakarta menganggap penting kerjasama penelitian dengan berbagai lembaga penelitian dan universitas. Selain dampak ekowisata (lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi), KPH memandang topik manajemen ekowisata profesional cukup penting untuk dilakukan.

Penutup

Kegiatan pengembangan ekowisata difokuskan untuk meningkatkan dan memelihara sistem alami melalui kepariwisataan. Ekowisata merupakan sebuah strategi kontemporer yang vital bagi pemeliharaan ekosistem yang sehat, yang menyeimbangkan antara tujuan perlindungan-pelestarian alam dan keuntungan ekonomi. Ekowisata perlu direncanakan secara matang, dan diimplementasikan secara hati-hati, agar tercapai tujuan ganda tersebut. Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan alternatif strategi pengembangan ekowisata yang sangat populer karena pertimbangan hubungan sinergi masyarakat lokal dengan sumberdaya hutan.

Hal yang masih akan menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan masyarakat lokal dengan kesadaran lingkungan yang tinggi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat memajukan wisata alam tersebut secara bertanggung jawab. Karena dalam hal ini masyarakat yang menjadi aktor kunci dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan berupaya untuk mengintegrasikan budaya dan kearifan lokal dalam rangkaian kegiatan ekowisata.

Pustaka

- Badan Pariwisata DIY. (2017). *Statistik kepariwisataan Yogyakarta tahun 2017*. <https://visitingjogja.com/downloads/Buku-Statistik-Kepariwisataan-DI-Yogyakarta-tahun-2017.pdf>
- Diamantis, D. (1999). The concept of ecotourism: evolution and trends. *Current Issues in Tourism*, 2(2-3), 93-122
- Drumm, A. & Moore, A. (2005). Ecotourism development-a manual for conservation planners and managers. *Volume I-An Introduction to Ecotourism Planning*. The Nature Conservancy
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2005). State of the World's Forests.
- Widanti, E. M. (2018). Praktik pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata alam hutan pinus manganun. Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Yu, D. W., Hendrickson, T. & Castillo, A. (1997). Ecotourism and conservation in amazonian peru: short-term and long-term challenges. *Environmental Conservation*, 24(2), 130-138





KANOPPI (Kayu dan Non-kayu dalam Sistem Produksi dan Pemasaran yang Terintegrasi)

Kanoppi adalah kegiatan penelitian yang didanai ACIAR (*Australian Centre for International Agricultural Research*) dan dikoordinasikan oleh ICRAF (*The World Agroforestry Centre*) dan CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) sejak tahun 2013. Tujuan penelitian Kanoppi adalah mengidentifikasi, meningkatkan, dan memperluas keterlibatan masyarakat kehutanan dalam mengelola produk kehutanan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui sistem produksi dan pemasaran yang terintegrasi pada tataran rumah tangga dan bentang alam.

Dengan pendekatan penelitian aksi partisipatif di Kanoppi, CIFOR dan Lembaga mitra (WWF Indonesia, Fakultas Kehutanan Universitas Mataram, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan) memfasilitasi proses pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung produksi dan strategi pemasaran kayu dan non-kayu terintegrasi.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibuat atas Kerjasama:



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani